

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, M. Afif, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdullah, Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, 2011, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Intrans Publishing, Malang.
- Anwar, Yesmil & Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Bandung.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly & Syahrizal, Achmad, 2006, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Konpress, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Fajar, Abdul Mukthie, 2006, *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Hertogh, Marc & Halliday, Simon 2004, *Judicial Review and Bureaucratic Impact: International and Interdisciplinary Perspectives*, Cambridge University Press, New York.
- Huijbers, Theo 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

- Kusnardi, Mohammad & Ibrahim, Harmaily, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta.
- Latif, Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi, Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Lutfi, Mustafa, 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Machan, Tibor R, 2006, *Kebebasan dan Kebudayaan: Gagasan Tentang Masyarakat Bebas*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, M. Laica, 2005, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum: Pikiran-Pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Poerbopranoto, Koentjoro, 1978, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung.
- Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 26 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Santoso, Agus, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Soedarsono, 2005, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Strong, C.F., 2012, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusa Media, Bandung.
- Syaukani, Gaffar, Afan, & Rasyid, Ryass., 2010, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar & Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta.
- Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wheare, K.C., 1996, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Nusamedia, Bandung.

B. Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi, Makalah, Jurnal)

Abdullah, 2013, “Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Alrasyid, Harun, 2011, “Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 1, Nomor 1.

Mangunsong, Jefer, 2009, “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 072-73/PUU-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1-2/PUU-XII/2014.